

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (1998) dalam (Mahsun 2006:134), analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Menurut Bernestein (1983) dalam (Mahsun 2006:134), analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran – ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Foster (1982) dalam (Mahsun 2006:134), analisis laporan keuangan mempelajari hubungan-hubungan didalam satu laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan- kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu.

Menurut Helfret (1982) dalam (Mahsun 2006:134), analisis laporan keuangan adalah alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen – komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/ daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus / defisit
- 5) Penerimaan pembiayaan
- 6) Pengeluaran pembiayaan
- 7) Pembiayaan neto
- 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- d. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan LRA, Neraca, dan LAK.

2. Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2015:2-3), salah satu pilar utama tegaknya perekonomian negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan.

Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan

keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah tercapai.

Terkait dengan tugasnya untuk menegakan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

- a. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.
- b. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat di andalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu

dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi–informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

3. Laporan Keuangan Untuk Transparansi

Menurut Mahmudi (2015:3-4), transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk ;

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran),
- 2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait,
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait

4. Tujuan Laporan Keuangan Menurut SAP

Menurut Mahmudi (2015:5), dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari standar akuntansi pemerintah, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2 Laporan Keuangan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Ratmono dan Sholihin (2015:10-13) berdasarkan peraturan pemerintah daerah terdiri atas: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan

saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL) neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan arus kas (LAK) dan catatan atas laporan keuangan (CAL) terkait dengan tugas untuk menegakan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya.

Adapun alasan pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan daerahnya yaitu: pertama, dari sisi internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Kedua, dari sisi eksternal laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal yaitu pertanggungjawaban yaitu pertanggung jawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga honor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Mahmudi, 2019: 2).

Ratmono dan Sholihin (2015:13) Adapun tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Ratomo dan Sholihin (2015: 8- 9) mengatakan menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintah, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yaitu antara lain:

1. Masyarakat

Informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pendanaannya sebagian besar dari pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan oleh rakyat.

2. Para Wakil Rakyat (DPRD)

Lembaga legislatif berkepentingan terhadap informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah dalam rangka mengawasi dan

menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Lembaga pemeriksa

Lembaga pemeriksa seperti Badan pemeriksa keuangan (BPK) berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan daerah untuk memeriksa dan memberikan opini apakah pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Analisis dan peneliti

Informasi yang di dapatkan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah biasanya diwujudkan dalam data base sistem informasi keuangan daerah (SIKD) sangat diperlukan untuk membuat analisis dan riset tentang berbagai hal yang terkait dengan kemampuan ekonomi suatu pemerintah daerah.

5. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.

Informasi keuangan daerah dipergunakan oleh pihak yang memberikan donasi untuk melihat apakah donasi yang diberikannya sudah sesuai dengan tujuan. Investor berkepentingan menggunakan informasi keuangan daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi terkait dengan investasi yang telah atau akan dilakukannya. Pihak yang berkepentingan untuk menilai apakah entitas pemerintah daerah kapabilitas ekonomi untuk pengembalian pinjaman yang diberikan. Adapun manfaat laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2015: 6), secara spesifik manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya;
- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan dengan peraturan perundang–undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan;
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - a) Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit kerja pemerintah lain;
 - b) Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintah;
 - c) Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;

d) Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan

b. Kebutuhan Informasi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2015:8), kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajiban biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- 2) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan pengguna dana yang telah mereka berikan. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan anggaran dan ketaatan pada peraturan perundang – undangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak daerah yang mereka bayarkan telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak–hak publik untuk mendapatkan pelayanan sudah dipenuhi dengan baik.
- 3) Kreditor dan Investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat resiko berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah.
- 4) DPRD dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara

- 5) Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis
- 6) Pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima dikaitkan dengan kinerja.

2.3 Keuangan Daerah

Dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya Poyoh, dkk mengatakan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segalanya berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Poyoh Marciah dkk, 2017:46). Menurut Rondonuwu (2015:26) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kaunang, dkk (2016; 357) Mengatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka APBD.

Menurut Yani (2009: 357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerima daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikekolah sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/ atau kepentingan umum.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam organisasi sektor publik laporan realisasi anggaran merupakan alat transparansi dan akuntabilitas publik yang dapat mengidikasikan kualitas pengelolah keuangan publik. laporan realisasi di susun berdasarkan basis kas meskipun dapat juga berbasis akural yang bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat kecapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mahmudi2019: 127).

Ratmono dan Shaosolihin (2015:25) mengatakan dalam bukunya laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan

pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas. Pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit laporan realisasi anggaran dan pembiayaan dari suatu entitas laporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran. Selanjutnya Mahmudi juga mengatakan laporan realisasi anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran juga bermanfaat dalam memperdiksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komperatif (Mahmudi, 2019: 127) .

Dengan demikian berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah komponen laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan sumber pendapatan, belanja, /pengeluaran, transfer pemerintahan daerah dan perbandingan antara realiasasi dan anggaran dalam suatu periode pelaporan yang dapat bermanfaat dalam memperdiksi sumber daya ekonomi.

2.5 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu organisasi pada periode tertentu baik pendapatan atau pengeluaran menggunakan suatu

ukuran tertentu dalam melihat keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan serta kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Menurut Sularso dan Restianto (2011:111) Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama suatu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut adalah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Rondonuw dkk, 2015: 26)

Adapun indikator kinerja keuangan daerah menurut Ropa (2016:740) indikator kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat, dan indikator dampak.

Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu organisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Hal ini dilakukan karena pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi demi kepentingan publik serta menilai dan mengevaluasi kinerja keuangannya. Ropa Oktavia (2016:739) mengatakan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk menemui tiga maksud, pertama, pengukuran sektor

publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dan memperbaiki kelembagaan .

Faktor keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam melihat keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Pengukuran kinerja keuangan selain sebagai tolak ukur pencapaian atas apa yang direncanakan oleh suatu organisasi atau daerah. Machmud, dkk (2014:5) mengatakan apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya di katakan sangat buruk.

2.6 Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah, mengukur potensi mendapat atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan meyakinkan bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan (Mokodompit, dkk, 2014:15).

Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dalam dilakukan secara rinci dengan cara melakukan analisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik. Adapun teknis analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan antara lain: Analisis Varians, analisis pertumbuhan, analisis rasio keuangan, analisis regresi, dan analisis prediksi (Mammudi, 2019:89).

Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang dimaksud adalah salah satunya laporan realisasi anggaran sebagai informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah daerah dalam satu periode. Mahmudi (2019:133) dalam bukunya juga mengatakan laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Dengan demikian berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut dapat membuat analisis pendapatan terdiri dari: analisis varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan daerah, rasio keuangan dan potensi penerimaan daerah. Analisis belanja terdiri dari analisis varians belanja, pertumbuhan efisiensi belanja, dan rasio belanja.

1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. pertumbuhan pendapatan positif akan cenderung meningkat, sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan (Mahmudi, 2019:136). Menurut Zuhri dan Soleh (2016:191), rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik jika setiap tahapnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Dengan demikian, jika diketahui pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan pengeluaran /belanja daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi apa saja yang perlu untuk mendapat perhatian. Menghitung pertumbuhan pendapat daerah, meliputi: pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer.

Rasio pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2019:137).

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Pertumbuhan Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn}(t - 1)}{\text{Pendapatan Thn } (t - 1)} \times 100\%$$

2. Keserasian Belanja

Mahmudi (2019:160) analisis keserasian bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Pandjaitan, dkk, (2018:1400) Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritas alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Sartika (2019: 149) mengatakan dalam rasio ini ada dua perhitungan yaitu perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi menginformasikan kepada pembaca laporan porsi belanja daerah satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan rutin atau berulang. sedangkan rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total; realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Rasio belanja modal memberikan manfaat bagi pembaca laporan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Rasio Keserasian belanja daerah dapat dikategorikan dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2019:160).

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari Rasio Efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio Efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Efektivitas PAD

Secara etimologis kata efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti berhasil. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Rondonuwu, dkk (2015:26) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, suatu

organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan dikatakan *spending wisley*.

Dengan demikian, analisis efektivitas adalah hubungan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan. Perhitungan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2019: 141) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

5. Efisiensi PAD

Zendrato (2018:95) rasio efesiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biasa yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima. Tujuan dan manfaat efesiensi adalah untuk mencapai hasil dan tujuan yang dicapai, menghemat penggunaan sumberdaya didalam melakukan kegiatan atau aktivitas, memaksimal penggunaan sumberdaya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma, meningkatkan kinerja suatu unit kinerja sehingga hasil keluaran semakin maksimal, untuk memaksimal keuntungan yang didapatkan.

Mahmudi (2019:141) dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah indikator rasio efektivitas PAD belum cukup, karena meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar maka pemungutan PAD tersebut

tidak efisien. Dalam menghitung rasio efisiensi PAD ini perlukan data tentang biaya pungutan PAD. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio efisiensi PAD dapat dihitung dengan rumus (Mahmudi 2019:141):

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

6. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam melihat suatu daerah. kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah daerahnya sendiri. Pramono (2014:105) dalam penelitiannya menjelaskan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan (Mahmudi, 2019: 140) :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

7. Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah adalah ukuran kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini diukur dengan membandingkan PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi. Rasio Ketergantungan daerah dapat dihitung dengan rumus adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Ketergantungan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

8. Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah indikator yang mengukur kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD dengan total penerimaan daerah, dan dinyatakan dalam persentase. Rasio derajat desentralisasi dapat dihitung dengan rumus adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.7 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Supina Sino, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif (2016)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat. Kabupaten Kutai Barat.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Alat analisis yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan daerah (rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan (PAD)
2	Wahidah Niken Kusumadewi (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012–2014	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2012–2014 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja operasi terhadap total belanja. Berdasarkan analisis rasio derajat desentralisasi Kabupaten Minahasan Utara tahun 2012 -2014 dapat dikatakan sangat kurang.
3.	Artahaingan H. Mutiha (2016)	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2010- 2014	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dari pemerintah kota bogor periode 2010-2014. Analisis kinerja keuangan ini dilaukan dengan menggunakan analisis rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langusng terhadap total belanja, serta rasio pertumbuhan.
4.	Supina Sino, Titin Ruliana, Imam	Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemrintah daerah

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Nazarudin Latif (2016) Puput Risky Pramita (2015)	Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013	Kabupaten Kebumen ditinjau dari rasio efektivitas PAD, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian keuangan daerah

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di bawah dimulai dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebagai sumber data peneliti. Laporan keuangan yang diperlukan adalah laporan realisasi anggaran periode 2017–2021 selanjutnya laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Nagekeo dianalisis menggunakan enam rasio yaitu, rasio pertumbuhan, rasio keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, rasio rasio efektivitas terhadap PAD, rasio efisien keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah sehingga menghasilkan laporan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Nagekeo setelah melakukan proses perhitungan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

